
POLITIK DIGITAL DI TENGAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI MODERN

DIGITAL POLITICS IN THE MIDDLE OF THE DEVELOPMENT OF MODERN DEMOCRACY

¹⁾Dilli Trisna Novisari,²⁾Suharso, ³⁾Budiharto

^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend Bambang Soegeng Km.5, Mertoyudan, Magelang

*Email: dilli@ummgl.ac.id

ABSTRAK

Pengaruh internet dalam ruang publik masyarakat Indonesia mengalami intensitas kenaikan dalam setiap tahunnya. Internet dijadikan bahan utama dalam pengolahan informasi yang ingin disuguhkan dalam khalayak ramai. Konten-konten internet diseting menjadi beberapa media social yang canggih dan cepat untuk diketahui secara massal. Masifnya penggunaan media sosial dalam kebutuhan keseharian menandakan kebutuhan akan akses informasi yang banyak, cepat, dan instan sangat digemari oleh masyarakat.. Berbagai pesan dan informasi yang timbul dalam media sosial itulah yang kemudian menjadi berbagai spekulasi dalam masyarakat sesuai dengan yang dihadapinya.

Perkembangan teknologi dan informasi yang kini sudah berbasis web (digital) menawarkan ruang dialogis, bahkan kritisasi dalam pemerintahan. Namun demikian negara dapat mengambil ruang sebagai sosialisasi tujuan negara dengan berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah guna mencapai pemahaman masyarakat terhadap gerak langkah neagra dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan berdasarkan demokrasi Pancasila. Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam pengembangan pembangunan demokrasi modern di Indonesia dengan pengembangan politik digital. Kebutuhan media informasi yang cepat, murah dan mudah inilah yang menjadi idola masyarakat. Karena itu negara juga harus mampu mengolah keinginan masyarakat dimana masyarakat inilah penopang paling penting dalam negara apalagi dalam negara demokrasi

Kata Kunci: Politik Digital, perkembangan, demokrasi modern

ABSTRACT

The influence of the internet in the public space of Indonesian society experiences an increase in intensity every year. The internet is used as the main ingredient in processing information that wants to be presented in the public. Internet content is set to become a number of sophisticated and fast social media to be known in bulk. The massive use of social media in daily needs indicates that the need for access to information that is large, fast, and instant is very popular with the community. It is the various messages and information that arise on social media that later become various speculations in the community according to what they face. The development of technology and information that is now web-based (digital) offers dialogic space, even criticism in the government. However, the state can take the space as a socialization of state goals with various policies taken by the government in order to achieve public understanding of the national movement in achieving the goals of the welfare state based on Pancasila democracy. Therefore, it is very important and significant to elaborate further on the existence of social media in the development of the development of modern democracy in Indonesia with the development of digital politics. It is this need for fast, cheap and easy information media that has become a community idol. Therefore the state must also be able to process the desires of the people where the community is the most important support in a country especially in a democratic country

Keywords: Digital Politics, development, modern democracy.

Keywords: Digital Politics, development, modern democracy

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan bentuk konvergensi informasi dalam era sekarang dimana informasi berasal dari multiarah dan multisumber. Perkembangan teknologi dan informasi yang kini sudah berbasis web menawarkan ruang dialogis, sekaligus ruang kritis terhadap peristiwa baik itu yang sifatnya datang dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Semua orang bisa menjadi informan dan penerima, terlepas dari kebenaran maksud informasi tersebut bermuatan politik atau tidak. Dengan kata lain, media sosial memberikan ruang bernama *cyberspace* untuk mendorong adanya deliberasi nilai-nilai demokrasi seperti halnya kesukarelaan (*voluntarism*), kesamaan (*egalitarianism*), maupun juga berjejaring (*networking*) dalam kondisi demokrasi kontemporer. Oleh karena itulah, sangatlah penting dan signifikan untuk mengelaborasi lebih lanjut mengenai eksistensi media sosial dalam konteks politik digital sebagai sarana pengembangan demokrasi yang cepat, ramah dan efisien. Keberadaan media informasi digital yang digandrungi oleh sebagian besar warga negara Indonesia, merupakan hal yang harus dijadikan energi positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, kegandrungan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap media sosial berbasis web ini jangan sampai menjadi energi negatif bahkan bumerang yang setiap saat bisa membunuh demokrasi di Indonesia. Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh politik digital dalam masyarakat serta menemukan cara agar politik digital ini dapat digunakan sebagai media yang efektif dalam pembangunan demokrasi di Indonesia. Eksistensi media sosial di Indonesia merupakan salah satu bentuk dari implementasi politik digital. Pengertian politik digital secara sederhana dapat dikatakan sebagai ruang pembentuk ikatan-ikatan politik dalam masyarakat berbasis konten teknologi yang sifatnya memperkuat atau mengurangi kadar demokrasi (Postill, 2012; Coleman,

2015). Pada dasarnya politik digital adalah arena besar yang memungkinkan adanya partisipasi, representasi, maupun artikulasi kepentingan kemudian bersinergi dan berkontestasi satu sama lain melalui konten digital sebagai agennya. Dari hal ini maka dapat dipahami potensi luar biasa politik digital ini untuk menjadi penopang kemajuan demokrasi di Indonesia.

Adapun kajian mengenai politik digital di kalangan ilmuwan social politik studi politik Indonesia masih langka. Studi awal yang mengangkat mengenai kajian politik digital dating dari Hill dan Sen (2005), keduanya menyoroti fungsi *mailing list* maupun *blackmail* sebagai agen perantara ide-ide demokrasi pada konteks Orde Baru. Selanjutnya kajian digital politik di Indonesia. Studi selanjutnya oleh Merlyna Lim (2013) maupun Nugroho (2010) yang mengkritisi adanya peran internet khususnya media social berperan besar untuk menciptakan kesadaran politik bagi masyarakat. Adapun kajian mutakhir dari Postill (2015) melihat adanya keterikatan politik yang tercipta dari interaksi kelas menengah dalam sosial media.

METODE

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *preskriptif*, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan digital politik kaitannya dengan perkembangan demokrasi modern.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu UUD 1945
- Data Sekunder berupa buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah, jurnal ilmiah, artikel ilmiah.
- Data sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, Situs internet yang berkaitan dengan Data yang diperoleh baik data primer, sekunder maupun tersier selanjutnya diolah dan dianalisa secara kualitatif. Dengan

metode analisis kualitatif dimana dalam penelitian ini menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan dalam sumber pustaka diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Aktivitas dalam menganalisis ini meliputi reduksi data yang diperoleh juga dilihat kemudian disajikan data yang dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori atau sejenisnya. Dan terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zaman modern menuntut semua fasilitas kehidupan juga modern. Tidak ubahnya fasilitas komunikasi bahkan fasilitas politik pun sekarang dituntut untuk modern. Modernisasi ini memberikan pengaruh besar terhadap semua gaya hidup masyarakat Indonesia. Dari model fashion, peralatan rumah tangga, peralatan kantor, alat komunikasi, alat transportasi, alat kedokteran bahkan sekarang alat politik pun dituntut untuk modern. Ini artinya modernisasi dalam suatu masyarakat ini tidak dapat dibendung.

Kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, mudah dan efisien menjadi latar belakang tuntutan bahwa semua yang dapat diakses lewat media internet/digital lebih menarik ketimbang informasi yang hanya dapat dinikmati tanpa adanya suara, gambar dan lain sebagainya seperti media cetak. Meskipun setiap media komunikasi dan informasi ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Media digital mampu menyedot antusias masyarakat untuk aktif mengikuti informasi yang berkembang di sekitar mereka, bahkan masyarakat secara luas, negara bahkan dunia.

Adanya perkembangan informasi dan komunikasi digital yang luas dan lebih digemari masyarakat menjadi kekuatan sendiri untuk mengembangkan informasi-informasi yang bermanfaat yang dapat diberikan oleh negara. Dalam negara Demokrasi seperti Indonesia ini keterlibatan masyarakat sangat penting bagi kemajuan negara. Oleh karena itu

negara harus pandai-pandai mengolah potensi ini untuk menjadikan masyarakat maju dalam negara demokrasi Indonesia.

Secara garis besar, tingkatan politik digital di Indonesia terdapat beberapa kategori yaitu *political awareness* (kesadaran politik), *political engagement* (keterikatan politik), dan *political activism* (aktivisme politik). Dalam beberapa kasus munculnya gerakan misalnya Gerakan 1 Juta Pendukung KPK, Koin Cinta Prita, maupun Relawan pada Pemilu 2014 menunjukkan kesadaran politik yang dipicu media social kini sudah mengarah dari semula gerakan moral yang berbasis keterikatan politik (*political engagement*) mulai menjadi gerakan politik (*political activism*).

Namun adanya transisi itu juga belum bias dijadikan parameter mendasar mengingat derajat kesadaran politik di Indonesia yang masih fluktuatif tergantung pada konteks yang mempengaruhi. Konstruksi terhadap preferensi politik di Indonesia tergantung seberapa jauh isu tersebut itu di-endorse dan kemudian *influencer* menyebarkan isu tersebut sebagai masalah atau kepentingan bersama (*common interest*) bagi masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut yang sebenarnya menjadi titik pijak bahwa keberadaan media sosial digital di Indonesia perlu untuk dioptimalkan sebagai media politik. Keterlibatan generasi muda dalam dinamika politik di Indonesia juga tidak bisa dikatakan minus sebab faktanya pada pemilu 2009, generasi muda cukup banyak yang mencoba ikut ambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Ada 38 partai politik nasional yang bertarung sebagai peserta pemilu dan sebagian besar dari partai baru yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut lahir dan dibidani oleh generasi muda. Namun sayangnya, partai-partai tersebut akhirnya tumbang dan tidak mampu bertahan dalam kerasnya kompetisi politik konvensional di Indonesia.

Ada banyak faktor yang membuat eksistensi partai politik yang dinahkodai oleh generasi muda tidak mampu bertahan

dalam politik konvensional di Indonesia seperti Kemapanan ideologis partai, kemampuan *financial* pemilik partai, penguasaan media elektronik seperti TV dan media massa yang lebih banyak dikuasai oleh para pemilik partai-partai besar, selain itu regulasi dan sistem demokrasi kita yang masih memberi ruang terjadinya *Money Politic* dan praktek KKN dalam proses demokrasi. Namun pada era saat ini adanya media digital yang menjadi idola sebagian masyarakat Indonesia menjadi instrumen generasi muda untuk ikut andil dalam kegiatan politik di negara. Bahkan tidak jarang masyarakat sendiri membangun isu-isu politik yang mewarnai politik negara. Hal ini tidak dapat dielakkan dari peran media digital sebagai sarana politik yang mutakhir menyedot sebagian besar masyarakat untuk ikut andil dalam mewarnai politik di negara Indonesia.

Dapat dilihat bahwa salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia, yang salah satunya hak untuk menyampaikan pendapat. Hak menyampaikan pendapat tidak lepas dari adanya hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Senada dengan itu, adanya hak-hak dasar bagi setiap warga negara mempunyai arti adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara (Sri Soemantri, 1992). Karena itulah hal ini dapat menjadi pertimbangan negara untuk menggunakan media digital sebagai instrumen yang efektif dan membangun bagi keikutsertaan masyarakat dalam perkembangan politik negara. Namun disisi lain haal ini menuntut agar negara memberikan batasan yang tepat dalam era politik digital tersebut agar politik yang terbangun tidak menjadi politik yang berkembang ke arah kehancuran demokrasi yang diakibatkan adanya demokrasi yang rusak atau keablasan.

Inilah sulitnya, menerapkan politik digital dengan hati-hati dan efisien. Meskipun demikian tidak dapat dibendung luapan keikutsertaan masyarakat dalam bidang politik melalui media digital.

Menjadi tantangan pemerintah adalah mengarahkan masyarakat dengan instrumen politik digital ini menjadi partisipan politik negara baik yang aktif maupun yang pasif kearah yang benar-benar sesuai dengan tujuan negara yaitu kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena pada kenyataannya tidak jarang dengan adanya politik digital saat ini masyarakat digiring ke arah politik praktis yang nantinya akan menjadi keuntungan segelintir orang dengan adanya jabatan pemerintahan yang diinginkan atau sekedar untuk popularitas politik yang diinginkan.

Dalam politik digital, ancaman menguatnya wacana sektional dan identitas seperti ujaran kebencian, sikap sektarianisme, informasi hoax, fitnah hingga pemutar-balikan fakta patut diwaspadai. Adanya kampanye berbasis SARA dan upaya adu domba diantara masyarakat akan sangat berbahaya, karena dampak yang ditimbulkan tentu sangat besar dan panjang. Bahkan bisa menimbulkan dampak psikologis yang belum tentu sembuh, meski kontestasi politik telah berakhir.

Hadirnya politik digital saat ini tentu sangat berpengaruh. Dikarenakan politik digital memiliki kontur yang terbukti menjadi penggerak utama dalam menghasilkan beragam opini, wacana dan kesadaran tentang kebijakan yang transformative pemerintahan negara. Kondisi inilah yang kemudian turut berpengaruh pada pembentukan sistem pengetahuan politik dan pemerintahan dalam nalar warganet yang terdiri dari berbagai macam lapisan masyarakat. Termasuk adanya penyalahgunaan media untuk membangun fanatisme kebencian yang turut serta menerabas batas-batas demokrasi substansial.

Dalam historiografi politik, proses pendidikan politik selama ini hanya menyentuh agar rakyat bisa digiring kebilik-bilik suara guna memberikan dukungan penuh pada partai tertentu, sedangkan kebebasan berpolitik rakyat tetap sangat terbatas. Artinya, kegagalan pendidikan politik inilah yang menjadi

awal berbagai masalah dalam kehidupan berpolitik masyarakat Indonesia. Apalagi proses pendidikan politik selama ini hanya diberikan sebatas pada kajian fakta dan bukan konsep dasar yaitu masyarakat sebagai pemegang kedaulatan negara. Padahal model pembelajaran politik bisa dilanjutkan dengan implementasi politik pada sektor dimana kekuasaan dapat dimengerti oleh rakyat

secara rasional, dan juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu unsur kehidupan bernegara yang nyaman bagi masyarakat. Tuntutan tersebut semakin mengalami disorientasi ketika bangsa ini memasuki era digital. Oleh karena itu politik digital ini menjadi instrumen penting bagi pembangunan politik yang berkemajuan bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Politik digital dalam era modern menjadi instrumen penting bagi negara untuk memajukan politik kenegaraan yang sehat, praktis, efisien dan nyaman bagi setiap warga negara Indonesia. Adanya politik digital menjadikan pendidikan politik semakin mudah bagi setiap warga negara namun disisi lain dapat menjadi bumerang ketika iklim politik negara memberikan warna yang dianggap tidak nyaman bagi warga negara untuk mengikuti politik seperti yang diinginkan oleh negara. Oleh karena itu politik digital ini harus menjadi *icon* penting negara untuk mencapai perlindungan politik, pendidikan politik serta kemajuan politik bagi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Coleman, Stephen & Freelon. (eds.). (2015). *Handbook of Digital Politics*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Hill, David & Sen, Khrisna. (2005), *The Internet in Indonesia's New Democracy*, Routledge, New York.
- Lim, Merlyna. (2013), 'Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism Indonesia', *Journal of Contemporary Asia*, vol.43, no.4, 636-57.
- Nugroho, Yanuar.(eds.). (2011). *Citizens in @ction: Collaboration, participatory democracy and freedom of information – Mapping contemporary civic activism and the use of new social media in Indonesia: final report*, prepared by The Research collaboration of Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester and HIVOS Regional Office Southeast Asia.
- Postill, J. (2012), "Digital Politics and Political Engagement". in Horst and D.Miller (eds), *Digital Anthropology*, Berg, Oxford.
- Soemantri, Sri. (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.